

**STUDI TENTANG FENOMENA PUTUS SEKOLAH
DI KALANGAN GENERASI MUDA DI KABUPATEN POSO**

***A STUDY ABOUT DROP OUT PHENOMENA
AMONG YOUNG GENERATION IN POSO REGENCY***



APRILINA T RANIA

P1600708014

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

MAKASSAR

2011

**STUDI TENTANG FENOMENA PUTUS SEKOLAH
DI KALANGAN GENERASI MUDA DI KABUPATEN POSO**

***A STUDY ABOUT DROP OUT PHENOMENA
AMONG YOUNG GENERATION IN POSO REGENCY***

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Sosiologi

Aprilina T Rania

P1600208014

Kepada

Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Program Studi Sosiologi

Makassar

2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan tuntunanNya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “ Studi Tentang Fenomena Putus Sekolah di Kalangan Generasi Muda di Kabupaten Poso”. Penelitian ini menganalisis tentang keberadaan kehidupan Generasi Muda yang tamat dalam satu jenjang pendidikan tapi tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan berikutnya khususnya bagi anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kepada semua pihak yang membaca tulisan ini kiranya memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan dan kelengkapan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada Prof. Dr. Maria E Pandu, MA sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Jurusan Sosiologi Universitas Hasanuddin dan selaku Tim Penguji yang telah membimbing, mengarahkan dan membina dengan tulus dalam penulisan tesis ini serta memberikan kemudahan selama penulis menempu Studi pada program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan curahan rahmat dan HidayahNya kepada beliau sekeluarga. Demikian pula kepada Prof. Dr.H.M Tahir Kasnawi, SU selaku penasehat I atas ketulusan dan keikhlasannya

dalam memberikan arahan dan bimbingan untuk penyelesaian tesis ini. Kepada Prof. Dr. H Mahmud Tang, MA selaku Penasehat II yang penuh ketulusan, keikhlasan dan ketekunannya dalam memberikan koreksi huruf demi huruf serta memberikan saran, bimbingan dalam tesis ini. Penulis sangat merasakan betapa besar makna dari arahan dan bimbingan kedua penasehat dalam penyelesaian tesis ini dan memperluas wawasan penulis dalam bidang ilmu sosiologi.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang paling dalam kepada tim penguji:

Dr. H Muh. Darwis, DPS, MA; Dr. Rahmat Muhammad, MSi atas segala masukan, saran dan koreksi dari tim penguji sangat terasa dalam menambah wawasan penulis untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan program Pascasarjana beserta seluruh Staf, Dekan Fisipol Universitas Hasanuddin beserta staf.

Ucapan terima kasih di sampaikan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII dan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Sulawesi Tengah dan Juga Rektor Universitas Kristen Tentena yang telah memberikan rekomendasi dan dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pascasarjana (S.2) di Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih dan hormat kepada Dra. Lies Sigilipu- Saino, Msi selaku Wakil Rektor I Universitas Kristen Tentena yang telah bersedia hati menghentar rombongan Mahasiswa studi S2 di Makassar.

Terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Jhon Max Poe'a.BA selaku pimpinan UPTD

(Unit Pelaksana Teknis Daerah) bersama staf; Kepala Sekolah SDN 1, SDN II dan SDN III bersama Guru-guru dan Staf, Kepala Desa Silanca bersama staf dan juga Masyarakat Desa yang telah membantu memberikan informasi dalam proses pengambilan data. Ucapan terima kasih yang sama kepada Adik-adik yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan banyak informasi yang di butuhkan dalam penulisan tesis ini.

Sembah sujud dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis yang penuh kesabaran, keikhlasan dan ketulusan dalam membesarkan, membimbing dan memberikan bekal kepada penulis semoga yang Maha Kuasa akan selalu memberkati dan menganugerahkan kekuatan, kesehatan dan keselamatan atas semuanya. Terima kasih dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu mertua atas segala dukungan doa dan motivasi yang di berikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada program pascasarjana.

Rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang tulus ikhlas penulis persembahkan kepada Suami tercinta Daniel I Bawias, SPd, Msi, atas segala kesabaran, ketulusan, kesetiaan dan pengertiannya untuk mendampingi penulis dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan. Motivasi, dukungan doa memberikan semangat dalam setiap kesibukan dan persoalan yang selalu datang silih berganti menguncang roda kehidupan selama bersama meniti karier. Juga kepada anakku yang tersayang Iglesio Marvelo Bawias yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang tulus kepada saudara-saudaraku, saudara ipar dan semua kemanakan yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan doa selama

menempuh pendidikan di pascasarjana. Kepada semua teman-teman kuliah dan kantor, sahabat dan handaitoulan yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas segala masukan melalui diskusi, dialog dan pendapat yang diberikan dalam perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini. Semua itu telah memberikan inspirasi kepada penulis.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak disebutkan namanya satu persatu semoga Yang Maha Kuasa menganugraahkan lebih dari apa yang telah diberikan kepada penulis dan harapan penulis karya sederhana ini akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pendidikan di Kecamatan Lage.

Makassar, Februari 2011

Penulis,

Aprilina Rania

ABSTRAK

APRILINA. Studi Tentang Fenomena Putus Sekolah Di Kalangan Generasi Muda di Kabupaten Poso (dibimbing oleh **Muhammad Tahir Kasnawi** dan **Mahmud Tang**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi mengapa siswa-siswa berhenti pada satu jenjang pendidikan, khususnya SD dan SLTP dan menemukan strategi dan pelaksanaan pendidikan yang sesuai dalam mengatasi jumlah anak yang berhenti pada satu jenjang pendidikan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Silanca, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, yaitu anak yang tidak melanjutkan pendidikan pada usia 13-18 tahun yang masing-masing tamat pada tingkat SD tidak lanjut ke SLTP 4 orang dan tamat di SLTP tidak lanjut ke SLTA 5 orang sehingga jumlah informan sebanyak 9 orang. Bentuk Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi kombinasi studi kasus dan fenomenologi. Strategi studi kasus dipilih atas pertimbangan ontologism bahwa karakteristik sistem sosial dan budaya suatu komunitas biasanya memiliki keunikan tersendiri. Fakta dan fenomena yang ditemukan kemungkinan hanya akan berlaku khusus di wilayah tertentu meskipun untuk aspek-aspek nilai dan norma pengetahuan berlaku universal. Selanjutnya fenomenologi dimaksudkan untuk mengurai fenomena secara analitis dan mencari makna yang melatarbelakangi tindakan. Pengumpulan Data dilakukan melalui Observasi non Partisipan, wawancara mendalam, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang tidak melanjutkan sekolah adalah anak yang tamat dalam satu jenjang pendidikan, tetapi tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan berikutnya, khususnya SD dan SLTP yang ada di Desa Silanca dengan interval waktu lima tahun terakhir (Tahun 2005-2009). Pada umumnya anak tidak melanjutkan sekolah di pengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti keadaan ekonomi, keadaan keluarga, Perilaku anak tidak melanjutkan sekolah, keadaan sosial budaya dan dampak dari tidak melanjutkan sekolah, serta strategi dan pelaksanaan pendidikan yang sesuai berdasarkan faktor yang memengaruhi anak tidak melanjutkan pendidikan.

ABSTRACT

APRILINA. *A Study about Drop Out Phenomena among Young Generation in Poso regency* (Supervised by Muhammad Tahir Kasnawi and Mahmud Tang).

This study aims to:(1) analyze the factors that make children drop out of schools in a level of education, especially in primary and junior high schools; and (2) find out strategies and educational system that can be appropriately used in reducing the number of drop-out cases.

This research was conducted in Silanca village, Lage sub-district, Poso regency among children who did not continue their study when they were 13-18 years old. Four of them graduated from primary schools but did not continue to the junior high school level; While 5 other children graduated from junior high schools, but did not continue to the senior high school level. The total number informants is 9children. This study used qualitative approach by combining case study and phenomenology. Case study was chosen based on ontological consideration that the socio-cultural system of a community usually has its own characteristics. The facts and phenomena that are found may be applicable only in certain areas, although the values and norms might be universally applicable. Furthermore, phenomenology was used to elaborate phenomena in analytic ways, and to obtain the meaning behind a certain behavior. Data collection was conducted by using non participant, observations, deep interview, and documentation.

The results reveal that children who drop out of schools are those who have graduated from a level of education, but do not continue to the next level, especially in primary schools and junior high schools in Silanca village in the last five years (2005-2009). Generally, the children did not continue their education because of some factors, including economic factor, family, children behavior, socio-cultural condition, the impacts of dropping out of schools, and the strategies of education.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Generasi Muda dan Permasalahannya	5
B. Pendidikan sebagai Proses Pembinaan Generasi Muda	8
C. Kebijakan Pembangunan tentang Pendidikan.....	29
D. Fenomena Anak Putus Sekolah	39
E. Kerangka Pemikiran.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Informan Penelitian	50

D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	52

BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa	54
B. Keadaan Geografi	56
C. Keadaan Sosial Demografi	56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan.....	65
B. Proses Pendidikan	79
C. Faktor-faktor yang menyebabkan Anak Tidak Melanjutkan Pendidikan	83
1. Faktor internal anak tidak lanjut pendidikan.....	83
2. Faktor eksternal anak Tidak lanjut pendidikan	99
D. Dampak tidak lanjut pendidikan	103
a. Pengangguran	104
b. Perilaku Menyimpang	108
E. Strategi dan Pelaksanaan Pendidikan yang harus di lakukan	110

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Daftar Susunan Kepala Kampung/Kepala Desa dan Periode Pemerintahan.....	55
Tabel 2	: Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk.....	58
Tabel 3	: Keadaan Penduduk menurut Kelompok Umur.....	60
Tabel 4	: Keadaan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan.....	62
Tabel 5	: Hasil Wawancara berdasarkan Faktor Internal.....	72
Tabel 6	: Hasil Wawancara berdasarkan Faktor Eksternal.....	75
Tabel 7	: Karakteristik informan mengenai umur, Jenis Kelamin, Status Tingkatan/Tahun tamat Sekolah.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap generasi ingin mewariskan sesuatu kepada generasi penerusnya. Warisan tersebut dapat berupa produk budaya ataupun ketrampilan, sikap dan pengetahuan yang dimilikinya. Proses untuk mewariskan keinginan tersebut pada dekade ini adalah dengan menyekolahkan penerusnya pada bangku pendidikan yang dianggap relevan.

Pendidikan merupakan masalah yang berhubungan langsung dengan hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan merupakan usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaanya, dalam membimbing, melatih, mengajar dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia, sesuai dengan sifat hakikat dan ciri-ciri kemanusiaanya.

Pendidikan berusaha membantu hakikat manusia untuk meraih kedewasaannya, yakni menjadi manusia yang memiliki integritas emosi, intelek dan perbuatan. Semua itu dalam rangka melaksanakan kebebasannya untuk memilih secara bertanggung jawab dan etis. Untuk meraih sifat hakikat pendidikan tersebut membutuhkan waktu yang panjang dalam pelaksanaannya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri.

Proses pendidikan akan mengalami kendala dan masalah apabila sifat hakikat pendidikan, tidak dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia sebagai makhluk yang termulia diantara makhluk lainnya. Kendala dan permasalahan dalam pendidikan akan nampak dalam realitas kehidupan manusia dengan berbagai aspek seperti keadaan ekonomi, keluarga, sosial, lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Dari berbagai aspek tersebut akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pendidikan dalam setiap jenjangnya.

Permasalahan yang sering terjadi pada setiap jenjang pendidikan yaitu adanya anak yang *droup out* atau tidak melanjutkan pendidikan pada usia sekolah dan masih tergolong usia yang masih muda. Secara umum, di Indonesia, Angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan empat tahun terakhir masih di atas satu juta siswa per tahun. Dari jumlah itu, sebagian besar (80 persen) adalah mereka yang masih duduk di jenjang pendidikan dasar (SD-SMP). Dilihat secara persentase, jumlah total siswa yang putus sekolah dari SD atau SMP memang hanya berkisar 2 hingga 3 persen dari total jumlah siswa. Namun, persentase yang kecil tersebut menjadi besar jika dilihat angka sebenarnya. Jumlah anak putus sekolah SD setiap tahun rata-rata berjumlah 600.000 hingga 700.000 siswa. Sementara itu, jumlah mereka yang tidak menyelesaikan sekolahnya di SMP sekitar 150.000 sampai 200.000 orang.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk menanggulangi jumlah angka tersebut, dengan cara meningkatkan kesadaran tentang pendidikan dan hasilnya, terlihat dengan meningkatnya kepedulian masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang dasar

dan menengah bahkan perguruan tinggi. Namun upaya nyata ini terkadang terhenti dan bahkan putus sama sekali. Hal tersebut dapat dilihat dalam realita kehidupan masyarakat yang ada di Kecamatan Lage secara khusus Pada tingkat SD dan SLTP di Desa Silanca bahwa jumlah anak tingkat Sekolah Dasar (SD) yang tidak melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yaitu 55 anak dan SLTP tidak melanjutkan ke SLTA/ sederajat yaitu 101 anak dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Dari berbagai wawancara yang peneliti lakukan terhadap anak yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah disebabkan dan dipengaruhi oleh berbagai alasan yang berbeda-beda, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah anak yang tidak lanjut pada tingkat SD dan SLTP yang ada di Desa Silanca.

Berdasarkan latar belakang pemikiran ini, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "*Studi Tentang Fenomena Putus Sekolah Di Kalangan Generasi Muda di Kabupaten Poso*".

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan anak putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP?
2. Bagaimana strategi dan pelaksanaan pendidikan yang harus dilakukan dalam mengatasi anak yang hanya menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi berhenti pada satu jenjang pendidikan khususnya pada tingkat SD dan SLTP.
2. Untuk menemukan strategi dan pelaksanaan pendidikan yang sesuai dalam mengatasi jumlah anak yang berhenti pada satu jenjang pendidikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi yang berkaitan dengan pengembangan ilmu serta informasi dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian tentang Generasi muda dan Pendidikan.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah setempat khususnya bagi pengembangan pendidikan di Kecamatan Lage.

3. Manfaat bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi sekaligus dapat memberi motivasi yang baik bagi masyarakat khususnya anak yang tidak melanjutkan pendidikan atau sekolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Generasi Muda dan Permasalahannya

Negara bangsa adalah milik bangsa, jadi bisa dikatakan pula berdemokrasi. Ada dua gagasan utama yang melatar belakangi pemikiran ini, yaitu *pertama*, generasi muda memiliki posisi yang penting dan menjadi poros bagi puna atau tidaknya sebuah negara dan generasi muda juga adalah harapan terwujudnya sebuah negara sebab mau tidak mau yang tua akan kehilangan kompetensinya dalam menopang negara bangsa akibat segi fisik yang makin menurun seiring dengan bertambahnya usia. *Kedua*, mempertahankan intergritas sebuah negara bangsa diperlukan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Intergritas sebuah bangsa tidak bisa dipertahankan dengan kekerasan atau lewat jalur militer. Kalaupun ada yang seperti itu intergritas yang terbentuk adalah sangat rapuh. Jadi yang penting adalah membentuk rasa kebangsaan itu. Dalam hal ini mempertahankan pendidikan dalam proses menumbuhkan rasa kebangsaan. Dari dua kesamaan gagasan tersebut di atas yaitu ada hubungan erat dan nyata yaitu antara “Generasi muda” dengan “pendidikan” dan keduanya menjadi perhatian utama dalam usaha mempertahankan intergritas sebuah negara bangsa. Alasannya, rentang waktu yang disebut “generasi muda” itu adalah “masa pendidikannya” sebaliknya “masa pendidikan” terutama diikuti para “generasi muda” dan masa pendidikan ini dilihat sebagai sebuah kesempatan dan sarana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri generasi muda yang notabene menjadi stake holdernya.

Atas gagasan tersebut diatas, ada dua point penting. *Pertama*, rasa kesatuan atau kebangsaan adalah penting demi mempertahankan sebuah negara bangsa tentunya tanpa mengabaikan generasi muda. *Kedua*, dibutuhkan suatu usaha untuk merevitalisasi *sense of nationalism* dalam diri generasi muda pada khususnya, sebagai calon penerus bangsa. Salah satu cara yang dianggap mengena adalah jalur pendidikan. Karena masa generasi muda adalah merupakan masa belajar, perlu diperhatikan pendidikan dalam arti formal, makin banyak dan makin tinggi pendidikan makin baik. Bahkan diinginkan bahwa tiap warga negara melanjutkan pendidikannya sepanjang hidup. Namun dalam realitas yang ada tampaknya mereduksi semangat revitalisasi karena realitas pendidikan di Indonesia masih tergolong jelek, bahkan majalah hidup dalam tajuk rencananya mengungkapkan bahwa pendidikan di Indonesia masih tergolong kelas kambing.

Permasalahan yang terjadi sekarang ini bahwa di Indonesia terdapat sejumlah anak yang masih berada pada usia sekolah tidak bersekolah lagi hal ini sangat memprihatinkan dan akan memberi pengaruh terhadap kemajuan bangsa Indonesia terutama bagi generasi muda yang adalah *stake holder* dalam menentukan arah kemajuan bangsa ini ke depannya. Pada tahun 2006 jumlahnya sekitar 9,7 juta anak yang putus sekolah. Namun setahun kemudian sudah bertambah sekitar 20 % menjadi 11,7 juta jiwa. Tidak ada keterangan dari Komnas Perlindungan Anak apakah jumlah tersebut merupakan akumulasi data tahun sebelumnya, lalu ditambah dengan jumlah anak-anak yang baru saja putus sekolah. Tapi walaupun jumlah itu bersifat kumulatif, tetap saja terasa sangat menyesakkan karena masih ada sejumlah anak yang putus sekolah.

Pendidikan formal memang bukan segala-galanya. Beberapa pengusaha besar di Indonesia, misalnya konglomerat Liem Sioe Liong, cuma lulusan sekolah dasar. Tapi itu kasus yang istimewa. Dalam kenyataan yang umum, tingkat pendidikan berpengaruh mutlak terhadap peluang bekerja, posisi di bidang kerja, tingkat *salary* dan fasilitas yang dapat dinikmati; menentukan pula terhadap perilaku individu dalam rumah tangga, tanggung jawab sosial dan mempengaruhi bobot independensi individu di bidang sosial-politik.

Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, kasus putus sekolah yang paling menonjol tahun ini terjadi di tingkat SMP, yaitu 48 %. Adapun di tingkat SD tercatat 23 %. Sedangkan prosentase jumlah putus sekolah di tingkat SMA adalah 29 %. Dari jumlah ini mereka masih tergolong anak usia sekolah dan merupakan anak muda yang adalah penerus bangsa.

Menurut catatan Komnas PA, pada tahun 2007 sekitar 155.965 anak Indonesia hidup di jalanan. Sementara pekerja di bawah umur sekitar 2,1 juta jiwa. Anak-anak tersebut anak yang masih tergolong dalam usia sekolah dan masih muda bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk membuka peluang untuk menjadi sasaran perdagangan anak terutama di kota. Bukan cuma itu, anak-anak yang hidup di jalanan itu juga sangat potensial disalahgunakan oleh kejahatan yang terorganisasi. Tekanan untuk bertahan hidup dan godaan untuk hidup mewah adalah dua titik lemah para remaja yang masih labil sehingga mereka bisa dibujuk dengan gampang untuk melakukan tindak kriminal.

Di Brazil, di antara jutaan anak yang hidup gontayangan di jalanan, sebagian sudah menjelma menjadi monster. Cukup diberi imbalan 100 dolar, anak-anak itu bisa

disuruh membunuh orang atau jadi kurir narkoba. Mereka membuat kehidupan sehari-hari di kota-kota besar semacam Rio de Janeiro dan Sao Paulo bisa berubah menjadi horor, tanpa disangka-sangka. Warga pun jadi resah, dan pemerintah kota yang kurang panjang akal dan tidak bermoral kemudian merespon kepanikan masyarakat dengan jalan pintas anak-anak itu ditembaki dan dibunuh secara massal pada malam hari, ketika mereka tertidur di taman-taman kota atau di emperan-emperan toko.

B. Pendidikan Sebagai Proses Pembinaan Generasi Muda

B.1. Pengertian Pendidikan

Kata mendidik merupakan terjemahan dari kata *pedagogi*. *Pedagogi* berasal dari Bahasa Yunani, yang terdiri atas kata *Paed* dan kata *Ago*. *Paed* artinya anak, sedangkan *Ago* artinya saya memimpin sehingga hakikat *pedagogi* ialah anak (yang) saya memimpin(nya). Kata *Pedagogi* muncul dari istilah *paedagogos*, ketika kata itu dipakai untuk menjuluki seorang laki-laki pada zaman Yunani Kuno, yang sehari-harinya berkewajiban membawa anak-anak ke sekolah (*Gymnasium*). Kemudian, dalam perkembangan berikutnya, perbuatan *paedagogos* tersebut dijadikan simbol untuk menunjuk perbuatan mendidik. Oleh karena itu *pedagogik* merupakan ilmu tentang mendidik.

Menurut Langeveld (dalam Komar 2006), *pedagogik* adalah antropologi normatif yang diterapkan. Kesimpulan itu diperoleh dari hasil analisis yang cermat terhadap situasi pendidikan. Dalam situasi pendidikan itu akan ditemukan suatu indikasi/ciri hakikat keterlibatan unsur-unsur pendidikan sebagai berikut:

- a. Anak yang telah memahami simbol untuk menerima perintah dan larangan.
- b. Orang dewasa yang memiliki sikap kasih sayang, kepercayaan dan moral atau melaksanakan norma-norma.
- c. Orang dewasa yang memiliki tujuan dan pelaksanaan bimbingan anak selalu diarahkan pada tujuan itu.
- d. Orang dewasa yang berwibawa, yakni menciptakan suatu pergaulan yang membawa kesadaran anak untuk mematuhi norma-norma, baik berupa pelaksanaan perintah maupun menjauhi larangannya dan sekali-kali bukan karena dipaksa oleh siapapun.
- e. Pergaulan yang tercipta itu secara sengaja diadakan antara anak dan orang dewasa.
- f. Tumbuh suatu perilaku tanggung jawab sebagai implikasi dari pergaulan.
- g. Terwujudnya suatu tujuan pendidikan yang tergambar pada perilaku anak yang melaksanakan norma-norma/moral dan etika secara bertanggung jawab atau anak yang memiliki ciri-ciri kedewasaan.

Selanjutnya, Langeveld juga mengemukakan bahwa pendidikan adalah pertolongan orang dewasa daripada orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa dalam hal tingkah laku, tindak tanduk, hal berpikir serta bertanggung jawab dalam diri sendiri. Dengan demikian pendidikan adalah bantuan untuk anak didik atau anak usia sekolah dalam perkembangan yang menyeluruh menuju kedewasaan.

Kedewasaan yang dimaksud adalah kemampuan untuk berdiri diatas kaki sendiri dan kematangan jiwa yang memungkinkan seseorang memiliki kemerdekaan dalam menentukan sikap dan menghayati hubungannya dengan manusia, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan berusaha membantu hakikat manusia untuk meraih kedewasaannya, yakni menjadi manusia yang memiliki integritas emosi, intelek dan perbuatan. Semua itu dalam rangka melaksanakan kebebasannya untuk memilih secara bertanggung jawab dan etis.

Pendidikan dalam arti umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya serta ketrampilannya kepada generasi muda untuk memungkinkan melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama, dengan sebaik-baiknya. Corak pendidikan itu erat hubungannya dengan corak penghidupan, karena jika corak penghidupan itu berubah, berubah pulalah corak pendidikannya, agar si anak siap untuk memasuki lapangan penghidupan itu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (1)).

Sedangkan menurut Soejono (dalam Hippy 2008), pendidikan adalah usaha orang dewasa terhadap anak muda untuk mendewasakanya, agar dapat memenuhi

tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu yang terdiri atas jasmani dan rohani.

Menurut Sudrajat Hari (dalam Hippy 2008) definisi pendidikan adalah proses memanusiakan manusia melalui pembelajaran dalam bentuk aktualisasi potensi peserta didik menjadi suatu kemampuan atau kompetensi. Kemampuan yang harus mereka miliki, pertama adalah kekuatan spiritual keagamaan, atau nilai-nilai keagamaan yang tergambar dalam kemampuan pengendalian diri dan pembentukan kepribadian diri yang dapat diamalkan dalam bentuk akhlak mulia, sebagai suatu aktualisasi potensi emosional (EQ), kedua kompetensi akademik sebagai aktualisasi potensi intelektualnya (IQ), dan ketiga kompetensi motorik yang dikembangkan dari potensi indrawi atau potensi fisik. Atau pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan terjadinya pembelajaran sebagai suatu proses aktualisasi potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diperlukan dirinya bagi pengembangan dirinya.

Sedangkan menurut Brookkever dalam Rifa'l (dalam Hippy 2008) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha-usaha dalam rangka perkembangan dan tingkah laku manusia. Pendidikan mencakup usaha untuk meneruskan atau memindahkan kepada yang masih muda, berbagai ketrampilan, kepercayaan, sikap dan segi-segi lain dari tingkahlaku yang tidak mereka miliki sebelumnya. Pada golongan yang lebih tua, usaha ini mencakup perubahan dan pembaharuan berbagai pikiran, kepercayaan dan ketrampilan.

Menurut Tirtarahardja Umar dan La Sulo (2001) Pendidikan mempunyai sikap yang sangat kompleks, karena itu tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai

untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Pendidikan sebagai transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain, sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan berarti suatu kegiatan yang sistematis dan terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, sedangkan pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja.

Dari definisi diatas, setiap anak yang lahir ke dunia ini akan bergaul atau berinteraksi dengan orang dewasa. Tidak ada anak yang langsung menjadi manusia dewasa yang sebenarnya, tanpa melalui proses pendidikan. Pendidikan ini meliputi usaha membimbing, membentuk manusia, melatih, mengajari, memberi teladan, bahkan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pelaksanaannya dapat dilakukan baik secara informal yaitu pendidikan keluarga dan lingkungan, non formal yaitu diluar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dikeluarga adalah tanggung jawab orang tua dan lingkungan masyarakat, sedangkan sekolah sebagai lembaga formal, pendidikan adalah wewenang penyelenggara pendidikan sekolah, dalam hal ini pemerintah dan unsur-unsur lain yang terlibat didalamnya yaitu guru, kepala sekolah, pengawas dan masyarakat maupun para pembuat kebijakan. Disamping itu, pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan masalah kehidupan. Hal ini karena jika tidak dihubungkan dengan masalah kehidupan, pendidikan akan kehilangan maknanya. Dengan demikian,

pendidikan sangat memperhatikan hakikat manusia, makna hidupnya, dari mana asalnya, dan akan kemana perginya.

B.2. Tujuan Pendidikan

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab.

Dalam dunia pendidikan formal, dikenal perjenjangan dalam tujuan pendidikan, tujuan ini dijabarkan dalam tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai dan dibebankan pada setiap jenjang pendidikan/tingkatan lembaga pendidikan, misalnya tujuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan tujuan pendidikan tinggi. Pada tiap jenjang pendidikan terdapat perbedaan tujuan sesuai dengan tingkatan peserta didik. Begitu pula dalam jenjang pendidikan dasar, ada tujuan pendidikan pada tingkat SD dan ada pula tujuan untuk pendidikan SLTP.

Menurut SK Mendikbud Nomor 008c/U/1975, tujuan umum pendidikan sekolah dasar adalah:

1. Memiliki sifat dasar sebagai warga negara yang baik
2. Sehat jasmani dan rohani

3. Memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja dimasyarakat, dan mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

Sedangkan tujuan umum pendidikan di SLTP (SK Mendikbud Nomor 008d/U/1975 adalah:

1. Menjadi warga negara yang baik sebagai manusia yang utuh, sehat, kuat lahir dan batin.
2. Menguasai hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan sekolah dasar.
3. Memiliki bekal untuk melanjutkan pelajaran kesekolah lanjutan atas dan untuk terjun ke masyarakat.

Tujuan kurikuler adalah tujuan pendidikan yang dibebankan dan ingin dicapai dalam setiap mata pelajaran/bidang studi misalnya tujuan bidang studi matematika, IPA, IPS dan sebagainya. Kemudian tujuan instruksional yaitu tujuan yang ditetapkan guru pada setiap menyampaikan pelajaran dikelas disesuaikan dengan tujuan yang tercantum pada kurikulum pelajaran tersebut.

B.3. Fungsi Pendidikan

Secara umum, fungsi pendidikan ditujukan untuk mentransmisikan pengetahuan dan nilai-nilai. Akan tetapi, pengetahuan dan nilai-nilai yang ditransmisikan bukan hanya “dinyatakan” (*declare*) melainkan pengetahuan dan nilai-nilai yang “tersembunyi” (*hidden*). Sehubungan dengan hal ini para sosiolog membedakan antara *fungsi manifes* dan *fungsi laten* pendidikan. Menurut Horton dan Hunt (dalam Parwitaningsih 2006)

fungsi manifes institusi pendidikan antara lain adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi maupun bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan ketrampilan yang dibutuhkan dalam rangka berpartisipasi dalam masyarakat. Fungsi manifes ini biasanya menjalankan visi, misi dan kurikulum sekolah.

Akan tetapi disamping fungsi manifes, ternyata didalam institusi pendidikan tersebut tersembunyi pula apa yang disebut dengan “kurikulum yang terselubung” (*hidden curriculum*). Kurikulum terselubung ini tidak disadari keberadaanya tetapi pada dasarnya memainkan peranan yang sangat besar dalam penanaman nilai-nilai tertentu. Fungsi pendidikan yang tidak terlihat inilah yang disebut dengan fungsi laten.

Berdasarkan fungsi manifes dan fungsi laten, pendidikan berfungsi: (a). menanamkan ideologi dan mewariskan nilai-nilai budaya bangsa pada generasi baru, (b). mempersiapkan tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam proses produksi. Fungsi pertama lebih menekankan fungsi pendidikan sebagai gejala kebudayaan, dimana pendidikan berfungsi untuk menciptakan warga negara yang baik menyadari hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat bangsa. Fungsi kedua pendidikan dilihat sebagai gejala ekonomi, yakni mempersiapkan seseorang untuk memasuki pasar tenaga kerja, lewat serangkaian proses pembelajaran. Fungsi yang kedua ini langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi distribusi pendapatan dan pelayanan dimasyarakat.

B.4. Unsur-Unsur Pendidikan

Unsur-unsur yang terlibat dalam proses pendidikan, menurut Tirtahardja Umar dan La Sulo (2001) terdiri dari:

- a. Subyek yang dibimbing (peserta didik)
- b. Orang yang membimbing
- c. Interaksi antara peserta didik dan dengan pendidik (interaksi edukatif)
- d. Kearah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
- e. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan)
- f. Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode)
- g. Tempat dimana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan)

Peserta didik adalah subjek pendidikan yang menerima bimbingan, pengajaran dan latihan dari pendidik, sebagai subyek pendidikan, peserta didik adalah pribadi otonom ia memiliki kemampuan untuk berkembang, potensi fisik maupun psikis yang unik, juga sebagai individu yang membutuhkan bimbingan secara manusiawi. Disamping itu peserta didik adalah individu yang mempunyai kemampuan untuk mandiri.

Orang yang membimbing atau pendidik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan, baik pendidikan dilingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun disekolah. Dilingkungan sekolah, pendidik adalah guru, baik guru bidang study maupun guru kelas/guru wali. Sebagai orang yang dibebani tanggung jawab pendidikan, maka pendidik sejogyanya adalah orang dewasa dengan segenap kemampuannya. Ia memiliki kemampuan lebih untuk menguasai peserta didik.

Diisyaratkan juga sebagai pendidik mempunyai kasih sayang disamping kewibawaan dan kemampuan penguasaan materi pelajaran, metode dan penggunaan alat pelajaran.

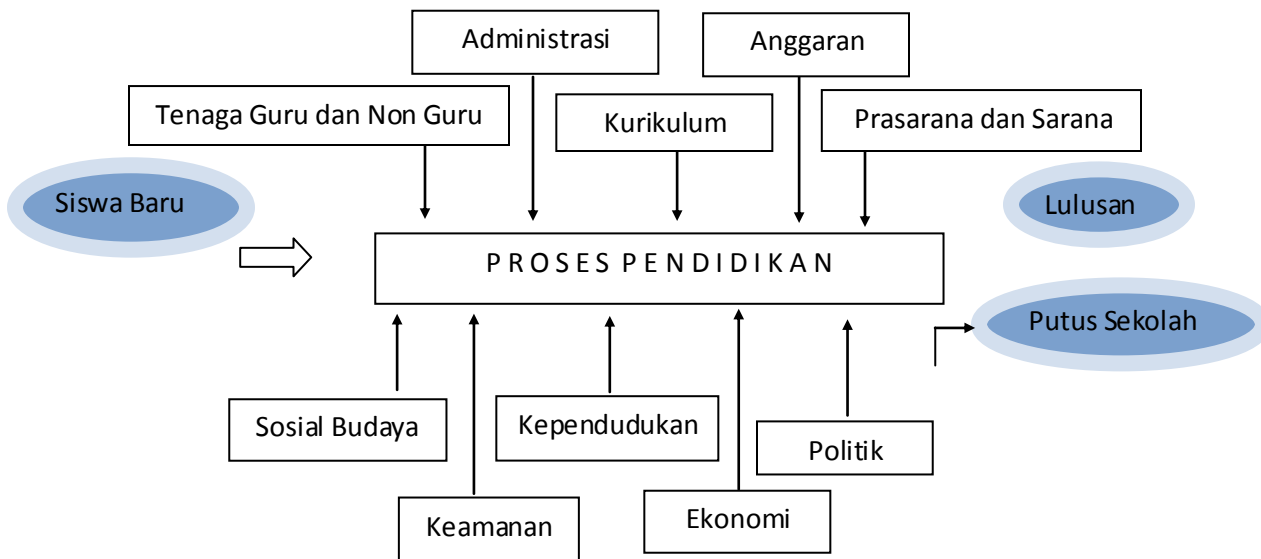
Guru mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, selain harus menguasai materi pembelajaran, guru juga hendaknya memiliki ketrampilan teknik-teknik mengajar. Teknik-teknik mengajar yang harus dikuasai oleh guru erat kaitannya dengan penggunaan metode dan alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Penguasaan teknik mengajar dapat membantu terhadap cara belajar siswa agar efektif dan efisien serta dapat memotivasi siswa dalam menggunakan dan mengembangkan pengetahuannya. Guru yang profesional senantiasa akan terus berinovasi, mencoba berbagai teknik belajar, dan menyajikan pelajaran sehingga pada akhirnya membantu siswa terhadap proses pemahaman materi pelajaran yang disajikan.

Menurut Gunawan dalam Hippy (2008) sebagai pengajar guru hendaknya memiliki perencanaan pengajaran yang cukup matang. Perencanaan pengajaran tersebut erat hubungannya dengan berbagai unsur, seperti tujuan pengajaran, bahan pengajaran, kegiatan belajar, metode mengajar dan evaluasi hasil belajar. Unsur-unsur itu merupakan bagian integral dari keseluruhan tanggung jawab guru dalam proses belajar mengajar.

Di SD, guru selain sebagai guru kelas yang bertugas membuat dan merumuskan Program Tahunan, Program Caturwulan dan Rencana Pengajaran (Renpel) juga sebagai administrator yang mempunyai tugas lain yaitu persiapan mengajar harian, buku penilaian, daftar hadir siswa, buku kelas, papan absensi harian, grafik absensi,

buku keuangan, daftar inventaris kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku mutasi siswa, buku supervisi dan buku penerimaan dan pengembalian raport.

Sistem pendidikan menurut Tirtahardja Umar dan La Sulo (2001) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Sistem Pendidikan

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam bidang pendidikan siswa baru merupakan masukan mentah (*raw input*) yang akan di proses menjadi tamatan (*out put*), guru dan tenaga non guru, administrasi sekolah, kurikulum, anggaran pendidikan, prasarana dan sarana merupakan masukan instrumental (*instrumental input*) yang memungkinkan dilaksanakannya pemrosesan masukan mentah menjadi tamatan, corak budaya, dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar, kependudukan, politik dan keamanan negara merupakan faktor lingkungan atau masukan lingkungan

(*enviromental input*) yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap berperannya masukan instrumental dalam pemrosesan masukan mentah.

B.5. Pendidikan dan Lingkungan Sosial

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, ketrampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain dirumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan dan sebagainya. Bahan pelajaran atau isi pendidikan ditentukan oleh kelompok atau masyarakat seseorang.

Demikian pula kelompok atau masyarakat menjamin kelangsungan hidupnya melalui pendidikan. agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, ketrampilan dan bentuk kelakuan lainnya yang diharapkan akan dimiliki setiap anggota. Tiap masyarakat meneruskan kebudayaannya dengan beberapa perubahan kepada generasi muda melalui pendidikan, melalui interaksi sosial. Dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai sosialisasi.

Dalam arti ini pendidikan dimulai dengan interaksi pertama individu dengan anggota masyarakat lainnya, misalnya pada saat pertama kali bayi dibiasakan minum

pada waktu tertentu. Dalam definisi ini tidak diadakan perbedaan antara orang tua dengan anak antara guru dengan murid. Yang diutamakan adalah adanya hubungan yang erat antara individu dengan masyarakat. Belajar adalah sosialisasi yang kontinu. Setiap individu dapat menjadi murid dan menjadi guru. Individu belajar dari lingkungan sosialnya dan juga mengajar dan mempengaruhi orang lain.

Dalam masyarakat primitif tidak ada pendidikan formal yang tersendiri. Setiap anak harus belajar dari lingkungan sosialnya dan harus menguasai sejumlah kelakuan yang diharapkan daripadanya pada saatnya tanpa adanya guru tertentu yang bertanggung jawab atas kelakuannya.

Juga dalam masyarakat yang maju kebanyakan kebiasaan dan pola kelakuan yang pokok dalam kebudayaan yang dipelajari melalui proses pendidikan atau sosialisasi informal. Bahasa, kebiasaan makan, dan kepribadian fundamental sebagian besar diperoleh melalui pendidikan tak-formal.

Namun sering dengan pendidikan dimaksud pendidikan formal di sekolah. Orang yang berpendidikan ialah orang yang telah bersekolah. Bila dalam pengisian formulir ditanyakan tentang pendidikan seseorang, maka yang dimaksud ialah sekolah-sekolah yang pernah ditempuhnya. Sistem pendidikan, yakni sekolah adalah lembaga sosial yang turut menyumbang dalam proses sosialisasi individu agar menjadi anggota masyarakat seperti yang diharapkan. Sekolah selalu saling berhubungan dengan masyarakat.

Melalui pendidikan terbentuklah kepribadian seseorang. Boleh dikatakan hampir seluruh kelakuan individu bertalian dengan atau dipengaruhi oleh orang lain. Maka karena itu kepribadian pada hakikatnya gejala sosial.

Aspek-aspek yang sama yang terdapat dalam kelakuan semua orang dalam masyarakat dapat disebut kebudayaan masyarakat itu. Kepribadian individu selalu bertalian erat dengan kebudayaan lingkungan tempat ia hidup.

B.6. Pendidikan dan Kebudayaan

Setiap bangsa, setiap individu pada umumnya menginginkan pendidikan. dengan pendidikan yang dimaksud di sini pendidikan formal, makin banyak dan makin tinggi pendidikan makin baik. Bahkan diinginkan agar tiap warga negara melanjutkan pendidikannya sepanjang hidup. Dahulu banyak tugas pendidikan yang dipegang oleh keluarga dan lembaga-lembaga lain yang lambat-laun makin banyak dialihkan menjadi baban sekolah seperti persiapan untuk mencari nafkah, kesehatan, agama, pendidikan kesejahteraan keluarga, dan lain-lain. Namun pendidikan formal tak dapat diharapkan menanggung transmisi keseluruhan kebudayaan bangsa. Masyarakat masih akan memegang fungsi yang penting dalam pendidikan trransmisi kebudayaan. Pendidikan norma-norma, sikap adat-istiadat, ketrampilan sosial, dan lain-lain banyak diperoleh dalam keluarga masing-masing. Proses ini diperoleh anak terutama berkat pengalamannya dan pergaulannya dengan anggota keluarga, teman-teman sepermainan dan kelompok primer lainnya bukan disekolah.

Fungsi utama sekolah adalah pendidikan intelektual, yakni “mengisi otak” anak dengan berbagai macam pengetahuan. Sekolah dalam kenyataan masih mengutamakan latihan mental-formal, yaitu suatu tugas yang pada umumnya tidak dapat dipenuhi oleh keluarga atau lembaga lain, oleh sebaba memerlukan tenaga yang khusus dipersiapkan untuk itu, yakni guru. Dalam pendidikan formal yang biasa

memegang peranan utama ialah guru dengan mengontrol reaksi dan respons murid. Anak-anak biasanya belajar di bawah tekanan dan bila perlu paksaan tertentu dan kelakuannya dikuasai dan diatur dengan berbagai aturan. Kurikulum pada umumnya juga ditentukan oleh petugas pendidikan, guru atau orang dewasa lainnya akan tetapi bukan oleh murid sendiri. Tidak selalu bahan itu menarik minat anak atau fungsional dalam kehidupan anak itu sendiri. Maka karena itu guru berusaha menarik minat anak, menggunakan paksaan atau macam-macam motivasi ekstrinsik.

Walaupun banyak kritik terhadap pendidikan dan guru bahkan sistem pendidikan banyak mengandung kelemahan, namun pada umumnya orang percaya akan manfaat pendidikan. Jumlah anak yang memasuki sekolah senantiasa bertambah. Banyak pemerintahan yang telah menjalankan kewajiban belajar, ada yang sampai usia 12 tahun adapula bahkan sampai usia 18 tahun. Dalam sistem kewajiban belajar, kelalaian menghadiri pelajaran di sekolah tanpa alasan dipandang sebagai pelanggaran undang-undang yang dapat diberi hukuman.

B.7. Kontrol Sosial dan Pendidikan

Dengan kontrol sosial dalam arti yang luas dimaksud setiap usaha atau tindakan dari seseorang atau suatu pihak untuk mengatur kelakuan orang lain. Oleh sebab kelakuan manusia senantiasa berlangsung dalam interaksi dengan orang lain maka sebenarnya semua kelakuan dipengaruhi atau dikontrol oleh interaksi itu. Banyak kelakuan dari setiap orang dipengaruhi oleh tindakan dan harapan-harapan orang lain. Jika pengaruh-pengaruh itu diinternalisasi artinya diterima dan diresapkan maka akhirnya akan menjadi norma atau pengangan bagi kelakuan individu dan dengan

demikian merupakan daya pengontrol. Ia dapat mengatur kelakuannya berdasarkan norma yang diperolehnya.

Dalam arti yang sempit dengan kontrol sosial dimaksud pengendalian eksternal atas kelakuan individu oleh orang lain yang memegang otoritas atau kekuasaan. Dengan kontrol ekstern demikian individu kadang-kadang terpaksa melakukan hal-hal yang berbeda dengan normanya sendiri. Kontrol serupa ini dapat dijalankan dengan kekerasan fisik atau secara verbal dengan menetapkan peraturan-peraturan. Dengan ancaman atau antisipasi hukuman guru atau kepala sekolah dapat mengontrol kelakuan murid-murid.

B.8. Kontrol eksternal dalam Pendidikan

Tak ada lembaga pendidikan yang bebas dari kontrol eksternal, baik sekolah yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta.

Sumber kontrol. Kontrol langsung disekolah bersumber pada kepala sekolah dan guru. Merekalah yang menentukan kelakuan yang bagaimana diharapkan dari murid-murid. Bila anak-anak melanggar peraturan, guru-guru dapat menggunakan otoritas untuk menindak murid itu. Dalam hal guru menghadapi situasi yang tidak jelas dituangkan dalam peraturan, ia harus berunding dengan kepala sekolah. Kepala sekolah dapat mentransfer kekuasaannya kepada bawahannya. Di sekolah kepala sekolah mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari guru akan tetapi ia juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas segala sesuatu yang terjadi di sekolah. Ia sendiri juga berada dibawah kontrol atasannya seperti Kanwil, Direktorat Jendral, Menteri P dan K dan pemerintah pada umumnya. Adanya sistem sentral dalam

pendidikan kita mempermudah kontrol dari pusat sehingga terdapat peraturan-peraturan uniform mengenai kurikulum, buku pelajaran, ujian, pengangkatan guru, upacara-upacara bahkan pakaian seragam murid. Ada pula kemungkinan, khususnya pada sekolah swasta, sekolah dikontrol oleh pengurus yayasan dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Bahkan seluruh masyarakat dapat turut mengontrol sistem pendidikan melalui mass media, Dewan Perwakilan dan cara-cara lain. Untuk memahami kontrol yang sesungguhnya atas pendidikan, harus dianalisis struktur kekuasaan dalam masyarakat. Bergantung pada keadaan suatu negara golongan mana yang paling berkuasa apakah golongan industrialis besar, kaum militer, tuan tanah, partai politik, golongan agama dan sebagainya. Golongan yang berkuasa ini akan berusaha memberi tekanan untuk mengatur atau mempengaruhi sekolah, misalnya melalui kurikulum, pengangkatan kepala sekolah, guru, bantuan keuangan dan sebagainya.

Tujuan kontrol bermacam-macam. Pada satu pihak diinginkan perubahan, pembangunan perluasan mobilitas sosial, dilain pihak ada usaha untuk mempertahankan status quo dan melestarikan norma-norma budaya yang ada. Ada kemungkinan golongan tertentu, sering golongan atas yang menginginkan perbaikan pendidikan tinggi, sedangkan golongan rendah menginginkan perluasan pendidikan kejuruan bagi anaknya agar cepat mencari nafkahnya sendiri. Ada pula kemungkinan golongan agama akan berusaha memasukkan atau memperluas pendidikan agama, sedangkan golongan veteran kerap kali menginginkan agar pendidikan kewarganegaraan mendapat tempat yang lebih penting dalam kurikulum. Para pencipta alam akan berikhtiar agar masalah lingkungan hidup mendapat tempat yang wajar

dalam pendidikan sedangkan mereka yang merasa prihatin akan kemerosotan moral generasi muda karena pengaruh narkoba, film seks dan kriminal menginginkan diperkuatnya pendidikan moral atau pendidikan agama di sekolah.

Alat kontrol yang digunakan antara lain berupa syarat pemilihan dan pengangkatan guru, serta peraturan-peraturan kepegawaian. Alat lain yang sangat ampuh adalah kurikulum sekolah sebagai usaha untuk membentuk manusia sesuai dengan filsafat serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam kurikulum ditentukan apa yang diajarkan, mata pelajaran atau bidang studi apa yang boleh diberikan. Di samping itu ditentukan pula buku pelajaran yang boleh digunakan. Mengontrol kurikulum serta buku pelajaran merupakan alat yang ampuh untuk mengontrol pendidikan. Kurikulum dan buku pelajaran bahkan dapat di buat uniform atau sama bagi semua sekolah yang sejenis dan setingkat diseluruh negara. Dengan ujian yang uniform kontrol itu dapat diperketat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh yang memegang kekuasaan.

B.9. Perubahan Sosial dan Pendidikan

Kecepatan perubahan sosial dalam berbagai masyarakat berbeda-beda. Perubahan masyarakat yang terpencil berjalan lambat, akan tetapi dengan terbukanya komunikasi dan transportasi daerah itu berkenalan dengan dunia modern, maka masyarakat ini akan berkembang dengan lebih cepat.

Ada aspek-aspek kebudayaan seperti adat-istiadat yang disampaikan turun temurun dalam bentuk aslinya, akan tetapi banyak pula adat kebiasaan yang mengalami perubahan, terutama dalam masyarakat modern. Di samping itu terdapat

perbedaan kecepatan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan mengenai benda-benda materiil seperti alat-alat, pakaian, hasil industri misalnya mobil, radio, arloji, dan sebagainya. Sangat cepat, orang senantiasa mencari barang yang paling modern dan paling baru. Sebaliknya terdapat tantangan yang keras terhadap perubahan dalam agama, adat-istiadat, nilai-nilai, norma-norma, bentuk pemerintahan, filsafat hidup dan sebagainya.

Usaha untuk mencegah perubahan tidak selalu mudah karena sering ada hubungan antara perubahan materiil dengan perubahan kultural. Dibukanya jalan raya ke daerah terpencil, terbukanya desa bagi surat kabar, radio, TV dan film membawa perubahan dalam berbagai aspek kebudayaan. Pola hubungan antara manusia seperti pergaulan antara anak dan orang tua, hubungan antar-seks, dan sebagainya, sering mengalami perubahan yang sukar dielakkan. Demikian pula pendidikan dan sekolah tak luput dari perubahan, karena pendidikan senantiasa berfungsi di dalam dan terhadap sistem sosial tempat sekolah itu berada.

B.10. Pendidikan Sebagai Daya Pengubah

Pendidikan berfungsi untuk menyampaikan, meneruskan atau *mentransmisi* kebudayaan, di antara nilai-nilai nenek moyang, kepada generasi muda. Dalam fungsi ini sekolah itu konservatif dan berusaha mempertahankan status quo demi kestabilan politik, kesatuan dan persatuan bangsa. Di samping itu sekolah juga turut mendidik generasi muda agar hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini sekolah merupakan "*agent of change*", lembaga pengubah. Sekolah mempunyai fungsi

transformatif. Setidak-tidaknya sekolah harus dapat mengikuti laju perkembangan agar bangsa jangan ketinggalan dalam kemampuan dan pengetahuan dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Untuk itu kurikulum harus senantiasa mengalami perubahan dan pembaharuan.

Perubahan dari negara agraria menjadi negara industri modern memerlukan orientasi baru bagi sekolah kejuruan yang menyediakan tenaga kerja yang sesuai dan juga sekolah-sekolah lain. Tiap perubahan dapat mempunyai efek sampingan yang merugikan. Sekolah harus turut berusaha mengatasi efek sampingan yang negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti polusi, kemiskinan, kejahatan, kemerosotan moral, konflik-konflik sosial, erosi adat-istiadat, kebebasan pergaulan, antar-seks dan lain sebagainya.

Dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sekolah memegang peranan penting sebagai “*agent of change*” untuk membawa perubahan-perubahan sosial. Akan tetapi dalam norma-norma sosial, seperti struktur keluarga, agama, filsafat bangsa, sekolah cenderung untuk mempertahankan yang lama dan dengan demikian mencegah terjadinya perubahan yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

B.11 Pendidikan dan Pembaruan Masyarakat

Ada para pendidik yang menaruh kepercayaan yang besar sekali akan kekuasaan pendidikan dalam membentuk masyarakat baru. Karena itu setiap anak diharapkan memasuki sekolah dan diberikan ide-ide baru tentang masyarakat yang lebih indah dari pada yang sudah-sudah. Sekolah dapat merekonstruksi atau mengubah dan membentuk kembali masyarakat baru.

Apakah harapan itu akan terpenuhi dapat dipertanyakan. Pihak yang berkuasa di suatu negara pada umumnya menggunakan sekolah untuk mempertahankan dasar-dasar masyarakat yang ada. Perubahan yang asasi tak akan terjadi tanpa persetujuan pihak yang berkuasa dan masyarakat.

Tak dapat diharapkan bahwa guru-gurulah akan mengambil inisiatif untuk mengadakan reformasi, oleh sebab guru itu sendiri diangkat oleh pihak yang berkuasa dan telah menerima norma-norma yang dipersyaratkan oleh atasannya. Perubahan yang dapat diadakan hanya kecil-kecilan saja di bawah pimpinan yang berwenang. Sekolah tak dapat melepaskan diri dari masyarakat tempat ia berada, dan dari kontrol pihak yang berkuasa. Sekolah hanya dapat mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat dan tak mungkin mempelopori atau mendahuluinya. Jadi tidak ada harapan sekolah dapat membangun masyarakat baru lepas dari proses perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat itu.

Tentu saja sekolah dapat digunakan oleh yang berkuasa untuk mengadakan perubahan-perubahan radikal yang diinginkan oleh pihak yang berkuasa itu, seperti dilakukan oleh Hitler di Jerman, partai komunis di Unisovyet, Jepang di daerah jajahannya dahulu dan sebagainya. Sistem pendidikan adalah alat yang ampuh untuk mengindokrinasi generasi muda agar menciptakan suatu masyarakat menurut keinginan mereka yang mengontrolnya. Perubahan suatu kekuasaan dalam suatu negara, misalnya oleh golongan yang menganut ideologi lain akan memanfaatkan sekolah sebagai alat untuk membangun masyarakat baru menurut ideologi mereka. Untuk itu mereka selanjutnya harus cukup lama memegang kekuasaan untuk mengindoktrinasi rakyat seluruhnya secara tuntas.

Dalam dunia yang dinamis ini tak dapat setiap masyarakat akan mengalami perubahan. Tidak turut berubah dan mengikuti pertukaran saman akan membahayakan eksistensi masyarakat itu. Tiap pemerintahan akan mengadakan pemerintahan yang diinginkan akan kesejahteraan rakyatnya dan keselamatan bangsa dan negaranya. Dalam pada itu diusahakan adanya keseimbangan antara dinamika dengan stabilitas. Perubahan-perubahan itu antara lain tercermin perubahan dan pembaharuan kurikulum dan sistem pendidikan.

C. Kebijakan Pembangunan dan Masalah Pendidikan

Dalam UU nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (*PROPENAS*), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu:

1. Mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai.
2. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global,
3. Sejalan dengan diberlakukanya otonomi daerah sistem pendidikan nasional di tuntutan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan keberagaman, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistis selama ini kurang mendorong terjadinya

demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Sebab sistem pendidikan yang sentralistis diakui kurang bisa mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekolah, serta keberagaman peserta didik, bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

Menguatnya aspirasi bagi otonomisasi dan desentralisasi tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan, konseptual dan penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu:

1. Kebijakan pendidikan nasional sangat sentralistik dan serba seragam, yang pada gilirannya mengabaikan keragaman sesuai dengan realitas kondisi, ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah,
2. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional lebih berorientasi pada pencapaian target-target tertentu, seperti target kurikulum, yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik.

Dengan adanya UU nomor 32 tahun 2004 (dimulai dengan UU nomor 29 tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah, di mana sejumlah kewenangan telah di serahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan. pemberlakuan otonomi daerah tersebut membawa implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan.

Disadari bahwa pemberian porsi besar kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan membawa sejumlah implikasi, seperti bidang administrasi, kelembagaan, keuangan, perencanaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kesiapan daerah untuk dapat menjalankan peran yang lebih besar *menjadi sentral* dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan.

Berdasarkan tata aturan perundang-undangan, setidaknya ada 33 kewenangan di tingkat daerah sebagai wujud otonomi. Kewenangan tersebut merupakan peluang yang demikian besar untuk benar-benar membangun bidang pendidikan secara kontekstual. Menurut analisis beberapa pakar dan praktisi pendidikan, di Indonesia saat ini paling tidak ada 5 persoalan pokok yang harus di pikirkan secara kontekstual di daerah bersangkutan, yakni mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas pendidikan. otonomi dalam konteks ini tidak di tafsirkan sebagai pengentalan warna kedaerahan yang promordialistis, tetapi di pahami dari sisi positif yang mengembangkan semua potensi yang dimiliki.

Dari 5 persoalan tersebut dapat di gambarkan masalah yang terjadi baik secara umum maupun secara khusus di bidang pendidikan pada masyarakat Kecamatan Lage berdasarkan jenjang pendidikan:

1. Permasalahan Umum

Secara umum permasalahan pendidikan di Kecamatan Lage dibagi dalam tiga bagian utama, yakni berkenaan dengan akses pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan serta efisiensi manajemen pendidikan. lebih rincinya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan kesempatan dan pemerataan pendidikan
 - 1. Masih ada anak usia sekolah, yang tidak bersekolah.
 - 2. Masih rendahnya cakupan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Data tentang layanan PAUD menunjukkan baru 3 tempat pelayanan PAUD yakni di Desa Tongko, Desa Sepe tapi belum ada laporan ke Dinas UPTD dan sudah beroperasi sejak bulan juli 2010, dan Desa Tagolu dan hal ini masih mengalami kendala yakni tenaga pendidik yang kurang dan sarana dan prasarana belum memadai.
 - 3. Masih tercatatnya penduduk buta huruf usia 15-44 tahun sebesar 15 persen dari jumlah penduduk kecamatan lage.
- b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
 - 1. Masih terbatasnya buku pelajaran bagi siswa maupun referensi untuk guru. Media belajar penunjang (alat praktek belajar) yang belum memadai, ruang kelas yang masih terbatas dan tidak memenuhi syarat bagi rombongan belajar.
 - 2. Metode pengajaran guru yang kurang bervariasi sehingga siswa kurang termotivasi untuk memahami materi secara mendalam. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya materi penguasaan metode pengajaran. Penguasaan media belajar ataupun minat baca guru yang rendah.
 - 3. Penyebaran guru yang belum merata pada sekolah-sekolah tertentu. Sehingga disatu sekolah jumlah gurunya berlebihan sementara sekolah lainnya mengalami kekurangan pada mata pelajaran tertentu.

4. Masih ada guru yang mengajar yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan (*teacher mismatch*). Sementara untuk sekolah menengah kejuruan, masih banyak guru yang bukan tenaga ahli dibidangnya ataupun tidak menguasai bidangnya.
5. Kurikulum muatan lokal yang belum menyentuh kepada kebutuhan dan tantangan ke depan ke daerah masing-masing.

c. Efisiensi manajemen pendidikan

1. Sistem informasi manajemen, dalam hal ini akurasi dan dokumen data di setiap sekolah belum berjalan dengan baik.
2. Hubungan kerja dan komunikasi antar Dinas masih kurang terkoordinasi.
3. Manajemen Kepala Sekolah masih kurang berkreasi dan berinovasi dalam upaya pengembangan sekolah, terutama standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan.

2. Permasalahan Khusus

Permasalahan pendidikan khususnya yang di hadapi di Kecamatan Lage akan di gambarkan menurut jenjang pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Pra-Sekolah (PAUD)

1. Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih terbatas jumlahnya dan untuk Kecamatan Lage sudah terdapat 3 lembaga PAUD yaitu di Sepe, Tagolu dan Tongko tetapi hal ini masih menimbulkan masalah selain tenaga pendidiknya masih terbatas juga masalah penyediaan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik

sehingga masih banyak anak usia pra taman kanak-kanak belum mendapat akses pendidikan yang sesuai dengan tahapannya.

2. Masih ada sekolah yang belum memenuhi standar minimal dari segi sarana dan Prasarana mutu dan profesionalitas guru.
3. Kualitas gizi anak belum memadai sehingga berpengaruh pada aktifitas bermain, sambil belajar anak menghayal, ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan ekonomi keluarga yang belum baik.
4. Pemahaman orang Tua tentang pendidikan anaknya sejak usia dini belum memadai, masih dipandang sebagai pendidikan alternatif.
5. Pendidikan kurikulum usia dini yang belum optimal mengacu pada ilmu sains pendidikan anak, sehingga materi belajar dan metode mengajar yang diadopsi menggunakan pola belajar pedagogik.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar dibagi dalam 3 kelembagaan pendidikan, yakni Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/ MTS) dan Sekolah Luar Biasa (SLB), berikut gambaran permasalahan:

- a. Mutu pendidikan belum di dasari pada penguasaan kompetensi dasar melainkan masih pada pencapaian angka partisipasi siswa.
- b. Proses pembelajaran masih berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan hal ini di sebabkan metode pengajaran guru yang tidak variatif dan inovatif.
- c. Tingkat kompetensi dan kesadaran profesionalisme guru belum memadai.

- d. Muatan kurikulum pendidikan dirasakan terlalu padat.
 - e. Pelaksanaan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah belum begitu di pahami oleh pengelola sekolah (Kepala Sekolah/Guru/Dewan Sekolah/Komite)
- c. Pendidikan Luar Biasa
- 1. Jumlah lembaga pendidikan luar biasa masih terbatas dimana di kecamatan Lage belum terdapat Sekolah Luar Biasa.
 - 2. Pandangan dimasyarakat masih beranggapan keberadaan peserta didik cacat sebagai beban.
 - 3. Sarana dan prasarana pendidikan sekolah luar biasa masih terbatas dan tradisional
 - 4. Mutu pendidikan dan tenaga guru profesionalitas terbatas.
 - 5. Manajemen penyelenggaraan sekolah dijalankan seperti pada sekolah biasa (Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Poso)

Dari permasalahan di atas, meskipun desentralisasi pendidikan merupakan sebuah keharusan, namun dalam realitasnya, pelaksanaan desentralisasi pendidikan terkesan satu tindakan yang agak tergesa-gesa dan belum siap. Hal ini bisa di lihat dari:

- a. *Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai.* Maksud SDM yang kurang yaitu berhubungan dengan kuantitas dan juga kualitas. Terdapat daerah tertentu yang kualitas SDM-nya belum dapat dengan baik memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan konsep desentralisasi pendidikan ini. Demikian pula halnya yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah SDM

- yang ada. Daerah tertentu masih melihat bahwa dari segi jumlah SDM mereka masih sangat terbatas.
- b. *Sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan memadai.* Hal ini berhubungan erat dengan kesediaan dana yang ada di setiap daerah. Selama ini, mungkin daerah-daerah tertentu asyik dan terlena dengan sistem *dropping* yang di terapkan oleh pemerintah pusat. Mereka sangat terkejut (*future shock*) ketika tiba-tiba memperoleh kewenangan untuk mengelola secara mandiri sebagian besar urusan pendidikan di daerahnya. Untuk itu, mereka belum siap dengan segala sarana dan prasarana yang diperlukan. Jika dalam waktu singkat mereka di persyaratkan untuk melengkapi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakandesentralisasi pendidikan tersebut.
- c. *Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)* sangat rendah. Beberapa daerah yang selama ini kita kenal dengan daerah tertinggal, merasa keberatan untuk langsung menerima beban kewenangan kebijakan desentralisasi pendidikan ini. Pembiayaan pembangunan yang mereka lakukan selama ini banyak di tunjang oleh pusat atau propinsi. PAD mereka masih tergolong sangat rendah. Oleh karena itu, jika memungkinkan, mereka masih berharap dapat di beri kesempatan untuk menunda pengimplemetasian kebijakan tersebut di daerah mereka. Bila memungkinkan mereka dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah lainnya yang memiliki PAD yang lebih besar, yang membuat mereka bisa mendapat sistem subsidi silang.

- d. *Secara psikologis, mental mereka belum siap menghadapi sebuah perubahan.* Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Namun, tidak semua orang memiliki pandangan dan sikap yang sama terhadap perubahan. Sebagian diantara mereka melihat perubahan sebagai sesuatu yang samar-samar, tidak jelas, tidak pasti, bahkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Hal ini tidak tertutup akan terjadi pada sebagian besar aparat atau masyarakat daerah tertentu. Ketakutan akan masa depan yang diakibatkan oleh perubahan yang terjadi, membuat mereka tidak siap secara mental menghadapi perubahan tersebut.
- e. *Mereka juga takut terhadap upaya pembaharuan.* Salah satu bentuk perubahan yang sering di pakai yaitu upaya pembaharuan. Pembaharuan dalam bidang pendidikan saat ini kita kenal dengan pembaharuan kurikulum. Setiap kali terjadi pembaharuan kurikulum , para guru kembali di sibukkan dengan berbagai kegiatan, seperti penataran, uji coba model, uji coba mekanisme, sosialisasi kurikulum dan sebagainya. Semuanya itu ditangkap oleh sebagian personil guru kita sebagai sebuah “malapetaka” atau setidaknya menjadi beban yang cukup berat bagi mereka.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemahaman dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah tentang pendidikan sangat di perlukan dalam upaya menjawab berbagai permasalahan tersebut.

Dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi di bidang pendidikan terdapat banyak persoalan yang muncul namun hal ini bukan dijadikan kendala untuk maju tapi

justru merupakan tantangan yang harus dihadapi karena pelaksanaan desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya yang pada dasarnya terkonsentrasi pada tingkat Kabupaten dan kota. Desentralisasi pendidikan justru tidak hanya berhenti pada tingkat kabupaten dan kota tetapi lebih jauh yaitu sampai pada tingkat sekolah.

Dalam upaya memaksimalkan penyelenggaraan desentralisasi pendidikan tersebut, sekarang di kembangkanlah konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang berupaya meningkatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar (*Stakeholder*) dalam pengelolaan pendidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik dan mutu lulusan semakin bisa di tingkatkan. MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Atau dengan kata lain, sekolah harus mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah semakin sedemikian penting. Di samping mengupayakan bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan yang dikemukakan di atas, juga selama ini di rasakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih belum optimal. Masyarakat di sini tidak saja pada orang tua dan masyarakat sekitar, tetapi juga dunia kerja dan dunia industri yang nantinya menjadi pemakai *out put* lembaga pendidikan yang ada. Dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat

tersebut, sekarang dikenal beberapa badan yang berfungsi mem-*back-up* penyelenggaraan pendidikan, seperti Dewan Pendidik, Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Badan Pertimbangan Pendidikan, dan sebagainya.

Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap lingkungan setempat. Masyarakat di tuntut agar mereka lebih memahami kompleksitas pendidikan, membantu, serta turut mengontrol pengelolaan pendidikan. adapun kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula mendapat perhatian oleh sekolah. Dengan demikian, sekolah dituntut memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah, karena keduanya merupakan penyelenggara pendidikan sekolah.

Adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para personel, menawarkan partisipasi langsung pihak-pihak terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

D. Fenomena Anak Putus Sekolah

Pemerintah Indonesia menargetkan tingkat partisipasi maximal dalam pendidikan dasar pada tahun 2008 semua anak usia 7-12 harus mampu mengenyam pendidikan sekolah dasar dengan tingkat kelulusan 99%. Sementara untuk satuan pendidikan menengah pertama pemerintah menargetkan tingkat partisipasi sebesar 96,1% dari 97% yang lulus. Untuk kedua tingkat tujuannya adalah mempertahankan tingkat *drop*

out maximal sebesar 1% (DBE3, 2008). Pendidikan adalah penting, penting bagi individu, penting bagi masyarakat, dan penting bagi negara. Pendidikan bisa memperbaiki kehidupan menjadi manusia menjadi merasa bebas mengubah peradaban.

Data pendidikan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002, tercatat sekitar 3.580.000 anak usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah dan sekitar 7,9 juta anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah di SLTA. Disamping itu berdasarkan data BPS tahun 2000 struktur tenaga kerja Indonesia 63,5% hanya berpendidikan SD ke bawah (PLSP, 2004).

Keputusan *drop out* adalah keputusan berbahaya bagi individu. Seseorang yang belum memiliki pendidikan dasar tidak akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keahlian minimum yang dibutuhkan menjalin kehidupan selanjutnya, belajar dan bekerja. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang *drop out* akan berpeluang lebih besar menjadi pengangguran, hidup dalam kemiskinan, terlibat tindak kejahatan atau melakukan aktifitas penyakit sosial misalnya mengkonsumsi narkoba dan minuman keras.

Saat ini banyak penelitian dan dokumen dan strategi untuk mengatasi anak putus sekolah. Penelitian ILO (International Labour Organization) pada tahun 2006 tentang pekerja anak dan kesempatan pendidikan menyatakan bahwa siswa yang tidak melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Indonesia disebabkan oleh tiga masalah besar, yaitu tidak adanya biaya sekolah (67%), lain-lain 9,7% dan anak bekerja 8,7%. Hasil studi ini menunjukkan bahwa meskipun subsidi biaya pendidikan

sudah diberikan oleh pemerintah sejak saman reformasi ternyata belum memberikan pengaruh yang signifikan alasan remaja tidak melanjutkan pendidikan (DBE3,2008) mengapa ada beberapa siswa yang merasa kurang aman di sekolah karena adanya perilaku yang menakutkan atau ancaman yang dilakukan baik oleh guru maupun teman sebaya. Ada sebahagian guru yang menggunakan cara menakutkan, seperti mengancam, menghukum, menyorsing, bahkan serangan fisik terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Hukuman yang diberikan kepada siswa membuatnya terasa tertekan, resah dan takut kepada gurunya. Faktor lain yaitu jarak antara sekolah dan rumah relatif jauh, sehingga kebanyakan siswa mengatakan kepada orang tuanya bahwa mereka ke sekolah tetapi ternyata mereka tidak sampai di sekolah. Meskipun hal ini jarang terjadi namun kadang-kadang dapat mempengaruhi siswa untuk tidak masuk sekolah dan akhirnya tidal lagi melanjutkan sekolahnya atau dengan kata lain mereka telah putus sekolah.

Penyebab putus sekolah sesuai dengan data dari Departemen Pendidikan Nasional terdapat beragam alasan. Namun dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu:

1. Institusional, faktor-faktor ini terkait dengan eksistensi lingkungan sekolah mencakup para guru, kurikulum, relevansi dan mutu, pengelolaan dan pencapaian tujuan yang masih rendah.
2. Kontekstual, faktor-faktor ini terkait dengan bagaimana dan dimana tempat tinggal kaum muda termasuk lokasi dan latar belakang keluarga.

3. Individual, faktor-faktor ini terkait dengan siswa itu sendiri dan mencakup kinerja akademis, jenis kelamin, dan usia (DBE3,2008).

Menurut Semiawan (dalam Supriyoko, 2006) salah satu faktor kunci yang menyebabkan anak putus sekolah adalah para guru (DBE3, 2008). Para guru umumnya memiliki motivasi rendah, gaji mereka rendah. Selanjutnya, menurut Power (dalam Supriyoko 2006) kualifikasi dan kompetensi para guru untuk SMP saat ini jauh di bawah standar Nasional. Dari guru yang tidak memenuhi persyaratan ini pada tahun 2003/2004. Faktor kekerasan di sekolah merupakan penyebab lain anak putus sekolah. Hukuman fisik kadang-kadang berhubungan dengan kemampuan siswa dalam belajar. Hasilnya sebagian siswa merasa takut dan sering tidak menghadiri pembelajaran dan kemudian mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah.

Supriyoko (2006), pakar pendidikan dari taman siswa bahwa orang tua yang setengah memaksa anaknya membantu mencari nafkah, atau di daerah pedalaman yang masyarakatnya hidup berpindah-pindah untuk menggarap lahan pertanian merupakan bagian dari faktor penyebab putus sekolah, bahkan ada orang tua yang memang tidak ingin agar anaknya melanjutkan pendidikan sekolah karena alasan tertentu. (*Kapan lagi, com*). Adapun masalah keterbatasan dan kurangnya dorongan dari orang tua murid juga termasuk penyebab banyaknya siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, sehingga menyebabkan mutu pendidikan menjadi rendah yang akhirnya terjadi kegagalan pendidikan. Kesibukan orang tua yang sangat padat, sampai-sampai tidak ada waktu juga untuk mengetahui serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anaknya di sekolah. Disamping itu tidak jarang pula terjadi akibat orang tua itu sendiri yang ternyata adalah sama sekali tidak pernah

mengenal bangku sekolah, sehingga wajar jika mereka tidak mampu mendampingi anak-anaknya ketika mengerjakan PR di rumah.

Salah satu angka dalam upaya yang dilakukan untuk menekan angka anak putus sekolah ada pada diri orang tua. Sikap sebagian orang tua yang masih beranggapan anaknya tak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti susah mencari pekerjaan itu menjadi salah satu kendala kultural yang tidak gampang dihilangkan. Seandainya pemerintah menyediakan banyak sekolah gratis, belum tentu menjadi jaminan masalah anak putus sekolah teratasi. “disediakan sekolah gratis tapi tetap tak berminat menyekolahkan anaknya, tentu saja percuma dan sia-sia”.

Menurut data Susenas 2004, dari penduduk usia sekolah 7–24 tahun yang berjumlah 76, 0 juta orang, yang tertampung pada jenjang SD sampai dengan PT tercatat baru mencapai 41, 5 juta orang atau sebesar 55 persen. Sementara itu, menurut data dari Balitbang Depdiknas 2004, angka putus sekolah atau drop-out di tingkat SD/MI tercatat sebanyak 685.967 anak, yang berhasil lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dan putus sekolah di tingkat SMP/MTs sebanyak 759.054 orang. Problem anak putus sekolah sejak dulu sampai sekarang tak pernah bisa ditangani hingga tuntas oleh pemerintah, karena akar permasalahannya sangat kompleks.*(no wwayhome.blogspot.com)*

Menurut Prof. Dr. Sodig A Kuntoro, sebagai pengamat sosial kemasyarakatan Universitas Sebelas Maret bahwa angka putus sekolah di Indonesia tergolong masih sangat tinggi hal tersebut dapat dilihat dalam angka putus sekolah SD dan madrasah ibtidaiyah, dalam enam tahun terakhir rata-rata putus sekolah sebanyak 761.366 anak

dari seluruh jumlah siswa SD dan MI sebanyak 25.729.254 anak. Belum lagi masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki kesempatan untuk masuk sekolah karena orang tua atau keluarganya tidak mampu. (*membegoria.blogspot.com*).

Data di Departemen Pendidikan Nasional memberikan gambaran terkait dengan permasalahan putus sekolah, diantaranya:

1. Anak putus sekolah dasar umumnya meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sementara pada sekolah menengah pertama umumnya angka tersebut menurun.
2. Angka putus sekolah di sekolah-sekolah umum lebih tinggi daripada di Madrasah.
3. Angka putus sekolah lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan bahwa anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah di pengaruhi dan disebabkan oleh berbagai alasan yang merupakan kendala untuk peningkatan pendidikan khususnya di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan ketrampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Hampir segala sesuatu yang kita

pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pokok struktural fungsional menurut Stephen K Anderson (dalam Nazsir 2008) adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung dan setiap bagian saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian yang lain.
2. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya dari masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
3. Semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintergrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen kepada anggota masyarakat terhadap serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
4. Masyarakat mengarah kepada suatu keadaan equilibrium atau homeostatis, dan gangguan pada salah satu cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
5. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat. Tetapi bila itu terjadi juga maka perubahan itu pada umumnya juga akan membawa kepada konsekwensi-konsekwensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pada fungsi pokok diatas, maka perlu disimak apa fungsi dari pendidikan, agar masyarakat dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, ketrampilan dan bentuk kelakuan lainnya yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota. Tiap masyarakat meneruskan kebudayaan dengan beberapa perubahan kepada generasi muda melalui pendidikan, melalui interaksi sosial.

Pendidikan dapat mempengaruhi generasi muda, sebab dengan pendidikan masa depan generasi muda dapat terjamin keadaannya dan melalui pendidikan terbentuklah kepribadian seseorang. Boleh dikatakan hampir seluruh kelakuan individu bertalian dengan atau dipengaruhi oleh orang lain, maka karena itu kepribadian pada hakikatnya gejala sosial.

Aspek-aspek yang sama yang terdapat dalam kelakuan semua orang dalam masyarakat dapat disebut kebudayaan masyarakat itu. Kepribadian individu selalu bertalian erat dengan kebudayaan lingkungan tempat ia hidup.

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia secara keseluruhan. Setiap manusia berhak mendapatkan atau memperoleh pendidikan, baik secara formal, informal maupun non formal, sehingga pada gilirannya ia akan memiliki mental, akhlak, moral dan fisik yang kuat serta menjadi manusia yang berbudaya tinggi dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

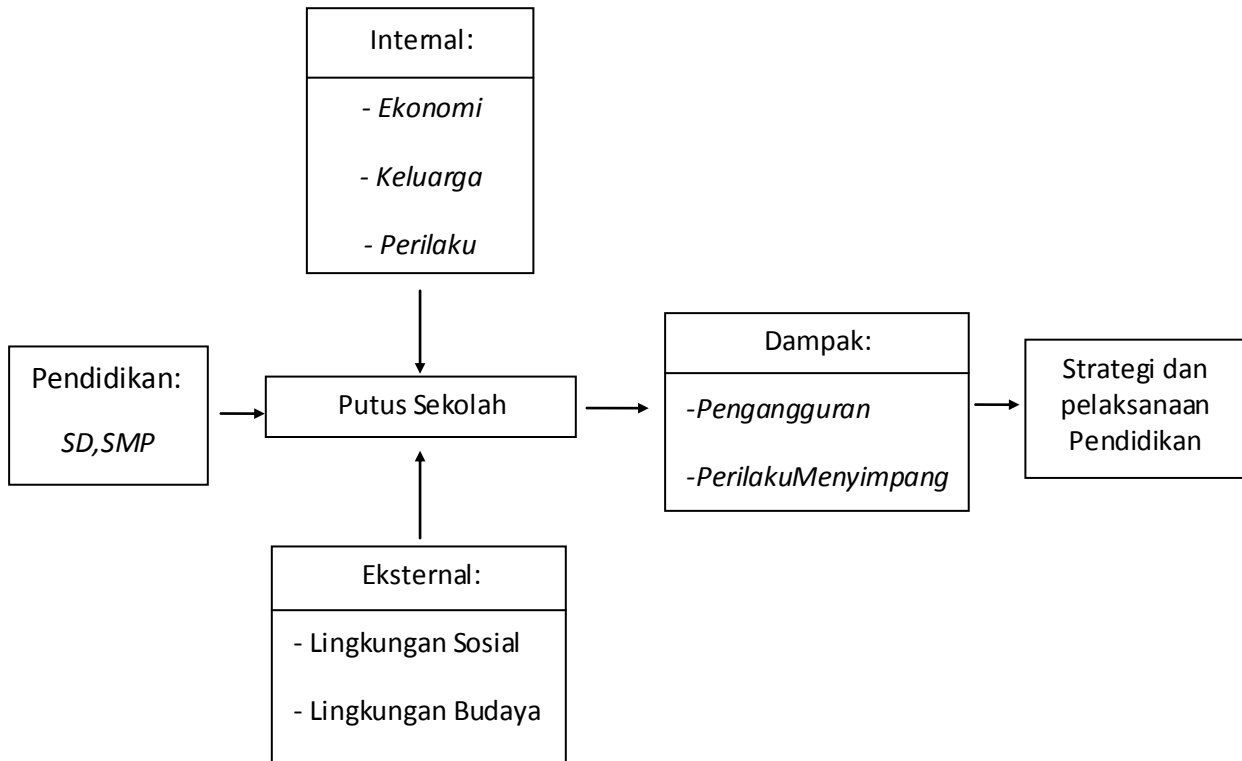
Namun jika kita melihat kenyataan dalam melaksanakan proses pendidikan, khususnya mereka yang berada di Desa Silanca ternyata kebanyakan anak-anak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan khususnya pada tingkat SD dan SMP.

Adapun faktor-faktor penyebab anak usia sekolah tidak melanjutkan sekolahnya disebabkan oleh berbagai faktor yaitu ekonomi keluarga yang kurang untuk mencukupi kebutuhan biaya pendidikan, keadaan dan keanggotaan dalam keluarga serta motivasi dari orang tua terhadap anak, keinginan dalam diri anak itu sendiri yang di akibatkan berbagai alasan yang melatar belakangi sehingga tidak ada motivasi dalam diri untuk melanjutkan pendidikan, di dukung juga oleh faktor lingkungan sosial masyarakat akan kesadaran dan pentingnya pendidikan dalam menunjang keberhasilan dan masa depan anak, bahkan faktor lingkungan budaya masyarakat setempat yang dapat mempengaruhi kesadaran anggota masyarakat dalam dunia pendidikan.

Keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan khususnya di tingkat SD dan SLTP adalah keputusan yang berbahaya bagi seorang individu. Terlebih pada usia tersebut setiap anak masih bergantung pada orang lain dan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan keputusan untuk tidak melanjutkan sekolah akan berpeluang lebih besar menjadi pengangguran, hidup dalam kemiskinan, terlibat tindak kejahatan atau melakukan aktifitas penyakit sosial misalnya mengkonsumsi narkoba dan minuman keras.

Untuk menghindar dari berbagai akibat atau dampak tidak melanjutkan pendidikan perlu adanya strategi dan pelaksanaan pendidikan yang harus dilakukan

sesuai permasalahan yang melatarbelakangi tidak melanjutkan pendidikan khususnya pada anak usia sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Bagan: Gambaran alur kerangka Pemikiran